

PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PUBLIK: TINJAUAN FILOSOFIS GAGASAN RUANG PUBLIK JÜRGEN HABERMAS

FX. Rudi Setiawan¹

| Faculty of Philosophy
Parahyangan Catholic University
Bandung, Indonesia

Abstract:

Jürgen Habermas is a second generation Frankfurt critical theory thinker who offers a new paradigm of critical theory, namely communication. He made an important contribution to the democratic life of complex and pluralistic contemporary society through his theory of communicative action. It offers a procedure for communicating through rational discourse to reach an intersubjective agreement. In a modern democratic country, public space becomes a forum where public opinions and aspirations are conveyed through rational argumentation as a form of control by citizens over the government. This public space is independent and free from state or market control. This article is an analysis of social media and its potential role as a public space, using Habermas' theoretical framework. Social media has the potential to become a political public space because of its participatory character. Even though implementing social media as a public space is still difficult, social media still has a big influence on democracy and social change. Therefore, social media users need to have and develop their social media literacy which is based on the principles of solidarity, criticality and caution.

Keywords:

public sphere • social media • communication theory • social media literacy • Habermas

Pengantar

Jürgen Habermas adalah pemikir besar Jerman kontemporer yang sangat berpengaruh terutama pada bidang filsafat, sosial, politik, maupun budaya. Salah satu karya terbesarnya adalah teori tindakan komunikatif (*Theorie des kommunikativen Handelns*) yang ditulis dalam dua jilid dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Teori kritisnya tentang tindakan rasional komunikatif lewat diskursus rasional memberi warna baru bagi pemikiran filsafat khususnya kajian demokrasi. Salah satu kontribusi teoritisnya yang berharga adalah pemikirannya tentang ruang publik politik, yaitu ruang tempat warga masyarakat demokratis dapat menyalurkan aspirasi maupun opininya secara argumentatif, bebas dan tanpa tekanan atau paksaan apapun.

Kemajuan teknologi internet membuka peluang bagi adanya kemungkinan ruang publik dilakukan lewat dunia maya. Media sosial atau dikenal dengan *Web 2.0*, yakni aplikasi internet generasi kedua, memungkinkan pertukaran informasi dilakukan secara interaktif dalam dunia maya dan dengan itu berpotensi menjadi ruang diskursus politis. Media sosial dapat digunakan sebagai ruang diskursus untuk menyuarakan perjuangan melawan ketidakadilan dalam masyarakat, maupun mengkritik pemerintah. Salah satu contoh kasus penerapan media sosial sebagai ruang publik adalah gerakan sosial masyarakat dalam media sosial pada kasus Satinah, seorang TKI yang terancam dihukum mati di Arab Saudi karena tuduhan membunuh majikannya.²

Akan tetapi, muncul beberapa keberatan untuk menempatkan media sosial sebagai ruang publik.³ Dapatkah ruang argumentatif tempat masyarakat menyuarakan aspirasi dan opininya secara bebas dan tanpa paksaan seperti diidealkan Habermas sungguh-sungguh diwujudkan melalui media sosial? Mungkinkah media sosial diterapkan sebagai ruang publik politik? Bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan ini, pokok bahasan yang hendak direfleksikan dalam artikel ini meliputi gagasan ruang publik politik Habermas, peluang dan tantangan media sosial untuk menjadi ruang publik, serta implikasi praktis yang muncul darinya.

Paradigma Komunikatif dalam Teori Kritis Habermas

Dalam mengembangkan teori kritisnya, Habermas banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran para pendahulunya dari Sekolah Frankfurt, khususnya Horkheimer dan Adorno. Horkheimer dan Adorno mengembangkan filsafat kritis tradisi pemikiran Marx, yang menghubungkan teori dengan praksis perubahan sosial untuk tujuan emansipasi manusia.⁴ Marx mengkritik kapitalisme dan bercita-cita menumbangkannya melalui revolusi kaum proletar. Akan tetapi, faktanya kapitalisme tidak tumbang, melainkan justru semakin kuat. Cita-cita emansipatoris Marx diteruskan oleh Horkheimer dan Adorno lewat kritik atas kemajuan industri yang menindas manusia. Namun, berbeda dari Marx yang menekankan kritiknya pada aspek ekonomi (produksi material) dan revolusi politik, Horkheimer dan Adorno mengambil jalur kritik atas kebudayaan dengan lebih menyoroti perkara rasionalitas. Para pemikir Sekolah Frankfurt ini mengkritik masyarakat kapitalisme lanjut yang dikuasai teknologi dan industri, berikut cara berpikir instrumentalnya yang merusak hubungan sosial antarmanusia. Dalam situasi industrialisasi itu, manusia bertindak mengobjekkan manusia lain dengan menempatkan mereka sebagai benda-benda produksi belaka.

Sejak modernitas yang berpuncak pada pencerahan, hubungan antara manusia dan alam terbentuk dalam kerangka subjek-objek. Manusia menjadi subjek yang menyelidiki dengan kemampuan akal budinya untuk menjelaskan dan menguasai alam sebagai objek. Upaya pengobjekkan alam ini tampak dalam ilmu-ilmu positif yang diwakili sains dan teknologi. Bagi Horkheimer dan Adorno, dominasi kerangka pikir positivisme ini menimbulkan penindasan oleh rasio, lewat instrumen sains dan teknologi yang mendominasi seluruh bidang kehidupan dan akhirnya menutup sama sekali seluruh kemampuan kritis manusia. Rasionalitas sebagai proyek utama pencerahan yang awalnya ditujukan mengemansipasi manusia agar menjadi individu otonom, kini justru berbalik arah menjadi instrumen yang menindas manusia. Upaya pencerahan untuk membebaskan manusia dari mitos melalui rasionalitas gagal. Yang terjadi ialah rasio justru memperbudak manusia secara menyeluruh, dan tidak ada jalan keluar rasional atas persoalan ini. Marcuse lewat gagasannya tentang manusia

satu dimensi (*one-dimensional man*) juga menggambarkan situasi yang sama, yaitu hidup manusia dikuasai dan hanya tertuju pada satu hal saja, yaitu rasionalitas teknologis yang menindas manusia secara menyeluruh, dan membelenggu manusia dengan cara-cara manipulatif melalui peran iklan-iklan yang menciptakan terus menerus kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi. Seperti Adorno dan Horkheimer, Marcuse juga menemui kesulitan untuk menemukan jalan keluar dari penindasan rasio. Para pemikir Frankfurt awal ini mengalami kebuntuan epistemologis dan pada akhirnya terjebak pada pesisisme total. Budi Hardiman menunjukkan bahwa proyek emansipatoris pemikir Frankfurt ini menemui kebuntuan epistemologis, karena mereka mengkritik rasionalitas yang ideologis, dengan rasionalitas yang pada dasarnya sama-sama ideologis juga.⁵

Habermas berusaha menemukan jalan keluar dari kebuntuan epistemologis para pemikir kritis Frankfurt awal tersebut dengan mengembangkan teori kritis yang memakai paradigma baru yakni komunikasi. Menurutnya, para pemikir kritis Frankfurt awal menggunakan paradigma lama bertolak dari filsafat subjek atau filsafat kesadaran yang dimulai sejak Descartes hingga Kant.⁶ Dalam cara berpikir filsafat kesadaran, manusia berkedudukan sebagai subjek individual yang menguasai objeknya yaitu alam, termasuk menjadikan manusia juga sebagai objek penyelidikan. Paradigma subjek-objek membatasi praksis pada sekadar tindakan subjek menguasai alam, sehingga karakternya monologis.

Habermas memberi warna baru pada teori kritis dengan mempertahankan rasionalitas pencerahan untuk mengemansipasi manusia, namun dengan paradigma baru yang bertitik tolak dari filsafat komunikasi. Dalam cara berpikir filsafat komunikasi ini, yang menjadi pokok perhatian adalah relasi antarmanusia. Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif, di mana pengetahuan bukan lagi diperoleh lewat tindakan subjek tunggal atas objek, tetapi melalui diskursus untuk mencapai konsensus intersubjektif. Ia mengganti paradigma teori kritis yaitu dari subjek-objek ke komunikasi intersubjektif, sehingga jalan keluar yang ditawarkan tidak monologis, melainkan dialogis. Habermas berpendapat bahwa pemikir kritis Frankfurt generasi awal mengalami kegagalan karena mengabaikan aspek komunikatif dengan membatasi rasionalitas pada kerangka instrumental saja.⁷ Habermas berhasil memberi landasan

epistemologis baru kepada teori kritis Frankfurt, sehingga atas upayanya itu ia dikenal sebagai pemikir kritis Mazhab Frankfurt generasi kedua.

Habermas menggunakan bahasa untuk mengembangkan teori kritis dalam rangka mengemansipasi manusia. Menurutnya, manusia pada dasarnya berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain. Relasi intersubjektif itu dimungkinkan karena peran bahasa. Baginya, salah satu peran bahasa adalah komunikatif. Di sini, bahasa dimengerti sebagai suatu tindakan komunikatif, yaitu berorientasi pada bagaimana bisa mencapai situasi saling memahami atau saling mengerti di antara manusia yang saling berinteraksi. Maeve Cooke menyampaikan keunikan teori kritis Habermas yakni menawarkan jalan perubahan sosial bukan melalui revolusi seperti halnya Marx, melainkan lewat bahasa yang digunakan sebagai alat penilaian kritis lewat tindakan komunikasi.⁸

Tindakan Rasional Komunikatif

Dalam *The Theory of Communicative Action* jilid 1, Habermas mengikuti Weber dengan meletakkan rasionalitas dalam konteks tindakan atau praksis, meskipun selanjutnya ia mengkritik Weber yang dinilainya monologis. Ia membedakan dua tindakan rasional manusia, yaitu: tindakan rasional instrumental atau tindakan rasional-tujuan serta tindakan rasional komunikatif.⁹ Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan rasional yang semata-mata terarah pada suatu cara atau sarana untuk mencapai tujuan. Tindakan ini bersifat fungsional, yaitu berorientasi pada bagaimana mencapai tujuan dengan cara kerjanya berupa penguasaan atas suatu objek. Tindakan ini pada dasarnya dilakukan pada barang atau instrumen, melalui suatu bentuk pekerjaan atau produksi, namun tindakan ini juga dapat ditujukan kepada manusia sebagai suatu tindakan strategis (tindakan menguasai atau mengendalikan manusia lain). Sementara itu, tindakan rasional komunikatif merupakan tindakan rasional yang diwujudkan antarmanusia agar untuk mencapai kesepakatan satu sama lain. Bagi Habermas, kedua tindakan rasional ini sama-sama dibutuhkan.

Habermas membedakan tindakan komunikatif dengan tindakan strategis.¹⁰ Tindakan rasional komunikatif dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama dengan bebas dan tanpa paksaan, dengan karakternya yang dialogis. Tindakan rasional komunikatif ini dibedakan dengan

tindakan strategis yang pada dasarnya digunakan untuk kepentingan mempengaruhi atau mengendalikan orang lain, dengan karakternya yang monologis. Tindakan strategis tidak diarahkan untuk tujuan mencapai konsensus. Interaksi sosial yang ideal dalam masyarakat lebih banyak dibentuk melalui tindakan komunikatif.

Bagi Habermas, tindakan komunikatif menjadi landasan untuk menjalin relasi satu sama lain dalam masyarakat. Masyarakat dikelola melalui tindakan rasional yang mengarahkan mereka pada suatu kesepakatan atau kesepakatan bersama. Tindakan komunikatif bekerja melalui bahasa dalam perannya yang komunikatif, yaitu bahasa yang memungkinkan orang dapat saling mengerti atau memahami. Tindakan komunikatif diwujudkan dalam bentuk diskursus rasional di antara orang-orang yang terlibat untuk menghasilkan suatu kesepakatan.¹¹ Untuk mencapai kesepakatan atau kesepakatan bersama melalui tindakan rasional komunikatif, dibutuhkan suatu “prosedur”. Kesepakatan itu dicapai melalui diskursus rasional, di mana orang-orang yang terlibat dalam komunikasi dan membangun kesepakatan masuk dalam “situasi percakapan ideal” yang memenuhi klaim-klaim validitas. Situasi “percakapan ideal” yang dimaksud Habermas adalah diskusi atau debat terbuka yang melibatkan sebanyak mungkin orang dengan tanpa distorsi, sehingga setiap orang dihormati sebagai setara dan memiliki kesempatan sama untuk menyampaikan pendapat atau kritiknya secara rasional tanpa paksaan, tekanan, ancaman, rayuan, tipuan, atau intervensi politis maupun ekonomis apapun.¹²

Konsensus dicapai melalui komunikasi dalam “situasi percakapan ideal” yang dilakukan secara rasional, tanpa manipulasi, serta menghargai kebebasan masing-masing peserta diskursus. Situasi percakapan ideal itu juga mesti didukung oleh klaim-klaim validitas dalam berkomunikasi, yaitu: kejelasan (*understandability*), kebenaran (*truth*), kejujuran (*truthfulness*), dan ketepatan (*rightness*).¹³ Klaim-klaim validitas itu menjadi semacam syarat normatif yang perlu dipatuhi oleh para peserta diskusi. Tanpa memenuhi keempat klaim validitas itu, suatu komunikasi untuk menghasilkan kesepakatan bersama tidak dicapai. Suatu komunikasi dapat tercapai dengan mensyaratkan adanya relasi di antara setiap partisipan yang bebas dan setara, saling menghargai, tulus atau jujur, tidak manipulatif, tanpa paksaan, dan sebagainya. Konsensus dinyatakan sah apabila dilakukan dalam situasi percakapan ideal serta memenuhi klaim-klaim validitas dalam komunikasi tersebut.

Habermas menawarkan prosedur komunikatif untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang dicapai dari suatu konsensus. Kebenaran pengetahuan yang dicapai melalui konsensus itu bersifat terbuka sebab kesepakatan pada dasarnya selalu mungkin untuk diperbaiki terus menerus. Bagi Habermas, kebenaran pengetahuan pada akhirnya tidak pernah merupakan kebenaran yang final, melainkan kebenaran yang terbuka pada kritik. Baert menyatakan bahwa Habermas tidak bertujuan membuat teori kritis untuk menghasilkan suatu jawaban final dan mutlak, melainkan menyediakan suatu prosedur rasional, terbuka dan sah dalam memperoleh pengetahuan.¹⁴

Gagasan tentang Dunia-Kehidupan dan Kolonisasi Sistem Terhadapnya

Gagasan Habermas lainnya yang penting untuk membangun teori tindakan komunikatifnya adalah gagasan ontologi sosial yaitu dunia-kehidupan (*Lebenswelt*). Gagasan ini dikembangkan dalam jilid kedua dari bukunya yaitu *The Theory of Communicative Action*. Habermas membagi dunia modern dalam dua kategori, yakni dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) dan sistem.

Gagasan Habermas tentang dunia-kehidupan diinspirasi dari Husserl. Dunia-kehidupan di sini dimengerti sebagai suatu horizon berupa anggapan, keyakinan, atau pengetahuan melatarbelakangi seseorang untuk bersikap atau bertindak merespons situasi hidupnya secara pra-reflektif. Dengan kata lain, dunia-kehidupan memberi landasan orang untuk bersikap atau bertindak tanpa memakai kesadaran atau pertimbangan reflektifnya. Bagi Habermas, dunia-kehidupan berperan sangat penting dalam praksis berkomunikasi. Dunia-kehidupan menjadi suatu wadah untuk menampung gagasan atau nilai-nilai yang diyakini yang membentuk latarbelakang masing-masing orang yang terlibat dalam praksis berkomunikasi. Suatu diskusi atau percakapan rasional yang melahirkan kesepakatan tidak berangkat dari cakrawala yang kosong di antara para pesertanya. Akan tetapi, masing-masing peserta sudah membawa serta keyakinan atau pengetahuan yang dapat melatarbelakangi dan memberi warna pada seluruh isi diskusi.¹⁵

Menurut Habermas, dunia-kehidupan ini tidak statis, tetapi terus bertumbuh secara dinamis melalui proses rasionalisasi, misalnya lewat kritik, penyelidikan, maupun pengujian ulang atas nilai-nilai, pengetahuan, atau keyakinan yang sudah ada. Tindakan komunikatif menjadi cara untuk merawat dan membentuk ulang terus menerus dunia-kehidupan ini. Dengan kata lain, dunia-kehidupan menjadi tempat yang memungkinkan masyarakat melakukan reproduksi simbolis. Singkat kata, bagi Habermas dunia-kehidupan berperan penting sebagai landasan tindakan komunikatif, tetapi juga sekaligus dibentuk terus menerus oleh tindakan komunikatif.¹⁶

Habermas membedakan dunia-kehidupan dengan sistem. Sistem merupakan dunia di mana manusia membangun hubungan yang bersifat fungsional, dan dengan itu melakukan tindakan rasional instrumental. Yang termasuk ke dalam sistem misalnya mekanisme birokrasi (administrasi) politik dan ekonomi. Lewat birokrasi politik dan ekonomi, manusia menjalankan fungsi-fungsi dalam hidupnya. Dalam sistem, uang dan kekuasaan politik berfungsi sebagai sarana reproduksi material.

Melalui teori kritisnya, Habermas menyelidiki penyakit masyarakat modern. Baginya, penyakit masyarakat modern terutama adalah kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem. Sistem yang berlaku dalam masyarakat mendominasi dan menguasai dunia-kehidupan, sedemikian rupa sehingga uang dan politik mengendalikan kehidupan. Dalam situasi ini, rasio jatuh menjadi rasio instrumental belaka yang menindas. Sistem yang berperan terlalu dominan ini menghancurkan dunia-kehidupan. Segala aspek kehidupan dimasukkan ke dalam kerangka teknis dan instrumental saja. Nilai-nilai, keyakinan, pengetahuan, dan tradisi yang telah dirawat dan dibentuk dalam dunia-kehidupan semakin hilang maknanya dan jatuh menjadi sekadar perkara fungsional. Reproduksi simbolis direduksi menjadi hanya reproduksi material. Birokrasi politik dan uang menguasai kehidupan masyarakat. Ketika uang dan birokrasi politik begitu berkuasa, sementara nilai-nilai tidak lagi bermakna, hidup manusia modern menjadi terasing. Manusia modern ditindas oleh kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem.¹⁷

Habermas menyelidiki kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem, yang telah membuat hilangnya kebebasan manusia. Sistem bekerja dalam dunia-kehidupan serta cenderung menguasai (bahkan merusak) dunia-

kehidupan. Ekonomi kapitalis maupun kekuasaan (administrasi) lewat cara kerja instrumentalnya merampas dunia-kehidupan, dan membuat semua hubungan menjadi fungsional. Di sini, tindakan komunikatif tidak lagi mendapat ruang. Cooke berpendapat bahwa kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem sebagaimana diselidiki Habermas memunculkan “pemiskinan budaya”, akibat reduksi sains, moralitas dan seni ke dalam kerangka instrumental yang dilakukan para ilmuwan.¹⁸

Habermas mengingatkan perlunya menciptakan keseimbangan ulang di antara dunia-kehidupan dan sistem. Ia menawarkan jalan keluar dengan cara memperkuat kembali dunia-kehidupan melalui tindakan komunikatif. Baginya, tradisi budaya dalam dunia-kehidupan perlu diproduksi ulang lewat proses diskursus rasional dalam situasi percakapan ideal yang memenuhi klaim-klaim validitas yang menghasilkan konsensus yang bersifat terbuka. Akan tetapi, Habermas tidak hendak menyingkirkan sistem. Baginya, sistem tetap berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengikuti Weber, ia lebih menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga lingkup budaya (yaitu sains, hukum atau moralitas, dan seni), tanpa ada salah satu yang dominan dan mengorbankan yang lain.¹⁹

Habermas berpendapat bahwa diskursus merupakan bentuk tindakan komunikatif dengan menggunakan argumentasi rasional untuk memeriksa atau menguji secara kritis berbagai norma, anggapan, nilai yang terdapat dalam dunia-kehidupan. Tujuan diskursus adalah mencapai suatu konsensus rasional. Dalam kehidupan sosial, warga masyarakat kontemporer tidak sekadar menerima dan meyakini nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku itu perlu dipertanggungjawabkan dan diselidiki secara rasional lewat suatu prosedur, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Gagasan Habermas ini dikembangkan dalam etika diskursusnya.

Pandangan tentang Demokrasi dan Ruang Publik Politis

Habermas memberi pengertian mengenai ruang publik (*public sphere*), yaitu “akses yang terbuka untuk semua warga masyarakat”.²⁰ Ruang publik ini bukanlah suatu tempat yang bersifat fisik, organisasi atau institusi administratif tertentu, melainkan suatu “kondisi” yang memungkinkan

arus opini dan aspirasi publik warga masyarakat dilakukan dalam situasi bebas, kritis, inklusif, dan tanpa paksaan atau tekanan apa pun. Di dalam ruang publik, setiap warga masyarakat dapat berpartisipasi secara setara, serta bebas dan terbuka untuk memberikan opini atau gagasannya.

Ruang publik itu menjadi ruang yang berdiri sendiri, bebas dari campur tangan kekuasaan politik maupun ekonomi. Karena tidak ada kepentingan birokrasi dan ekonomi yang mengintervensi ke dalamnya, ruang publik menjadi ruang untuk membangun komunikasi antar warga masyarakat. Mereka dapat berargumentasi secara mandiri, bahkan untuk mengkritik pemerintah atau pasar. Ruang publik ini dibentuk dari dunia-kehidupan, yaitu dunia sehari-hari tempat para warga masyarakat saling berinteraksi dan memahami satu sama lain lewat tindakan komunikatif. Melalui ruang publik, warga masyarakat dapat membentuk solidaritas bersama untuk mengawasi dan mengevaluasi pemerintah, atau bahkan memberi perlawanan atas hegemoni pemerintah.²¹

Ruang publik membutuhkan media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau koran dapat menjadi sarana nyata masyarakat untuk menyatakan opini dalam ruang publik. Media massa idealnya bersifat independen dari kekuasaan pemerintah maupun pasar, sehingga melalui itu masyarakat dapat mempublikasikan aspirasi dan opini mereka untuk tujuan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas mengemukakan gagasannya tentang ruang publik borjuis serta perubahan struktural yang terjadi di dalamnya. Ia menggambarkan fenomena ruang publik borjuis yang terjadi pada abad ke-18 di Inggris, Perancis, dan Jerman, yaitu situasi di mana terdapat sekelompok orang biasa yang melakukan diskursus di café-café maupun salon-salon untuk melakukan perubahan sosial. Mereka adalah orang-orang biasa, bukan pejabat pemerintah maupun pebisnis, yang memakai akal budi kritisnya secara mandiri untuk mengkritik praktik-praktik yang dilakukan pemerintah dan para pebisnis. Akan tetapi, di era transisi kapitalisme abad ke-19 ke abad ke-20, makna ruang publik itu bergeser karena dikuasai kepentingan-kepentingan politis dan ekonomi. Habermas menyebut situasi itu dengan istilah “refeodalisasi”.²²

Habermas menyampaikan bahwa pada praktiknya yang terjadi dalam dunia modern adalah kolonisasi dunia-kehidupan oleh sistem. Ruang

publik sebagai jantung demokrasi terancam dikooptasi oleh kekuasaan negara dan pasar. Kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem terjadi dalam media massa yang seharusnya menjadi saluran aspirasi dan opini masyarakat secara independen. Media yang seharusnya menjadi sarana untuk mengekspresikan opini publik dalam masyarakat demokrasi telah dikomersialisasi, sehingga dapat mengancam kelangsungan demokrasi. Habermas mengkritik komodifikasi dan komersialisasi media massa, yang membuat ruang publik berubah menjadi tempat promosi dan iklan untuk mewujudkan kepentingan korporasi-korporasi dalam kapitalisme.²³ Iklan-iklan tersebut menawarkan produk-produk yang hendak dijual kepada konsumen. Media massa menyimpan ideologi, yang bekerja lewat iklan yang memanipulasi hasrat konsumen untuk mengkonsumsi. Media massa disalahgunakan menjadi alat komersial dan kehilangan peran kritisnya untuk mewujudkan ruang publik.

Para aktor ruang publik yang dipengaruhi kekuasaan turut bermain dalam penyalahgunaan tersebut. Negara turut terlibat bersama dengan korporasi bisnis, mencaplok ruang publik lewat penguasaan terhadap media. Dalam situasi “refeodalisasi” ini, ruang publik sebagai sarana diskursus publik bergeser perannya, dari ruang tempat diskursus publik ke ruang komersial yang dipenuhi iklan-iklan. Opini dan aspirasi publik yang kritis berubah karena dikendalikan secara manipulatif oleh birokrasi dan uang untuk melayani kepentingan kekuasaan politis maupun bisnis.²⁴

Dalam salah satu artikelnya, Habermas mengangkat kembali soal ruang publik politis ini dalam usulannya tentang model demokrasi deliberatif yang dilandasi tindakan komunikatif.²⁵ Habermas mengembangkan teori demokrasi melalui gagasan komunikasinya. Dalam masyarakat demokrasi, rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Akan tetapi, dalam situasi masyarakat kontemporer yang serba kompleks dan majemuk, dibutuhkan suatu prosedur komunikatif.

Hardiman menyebut model demokrasi deliberatif sebagai model demokrasi ideal Habermas dengan memakai prosedur komunikatif.²⁶ Dalam demokrasi deliberatif, demokrasi tidak dipahami hanya sebatas pemilihan umum, melainkan proses yang terjadi setelahnya juga dalam bentuk penyampaian opini publik. Di sini, rakyat yang berdaulat berperan mengontrol pemerintah melalui opini atau aspirasi publik. Keputusan politis diuji melalui prosedur diskursus rasional yang terbuka

dan menghasilkan kesepakatan bersama. Kebijakan politis yang dibuat pemerintah diperbincangkan bersama secara rasional oleh masyarakat dengan bebas, tanpa paksaan atau tekanan apapun. Warga masyarakat yang terlibat bebas mengemukakan pandangan atau opini mereka. Percakapan itu menghasilkan konsensus yang senantiasa terbuka terhadap perbaikan yang ada, yang diwujudkan dalam bentuk hukum. Melalui model demokrasi deliberatif ini, ruang publik dapat menjadi ruang tempat pluralitas opini publik terjadi.

Habermas menyatakan bahwa demokrasi deliberatif dalam masyarakat kompleks itu bekerja ketika media bersifat independen baik dari negara, pasar, maupun aktor-aktor ruang publik, serta adanya masukan dan tanggapan dari warga masyarakat atas persoalan-persoalan masyarakat ke dalam ruang publik sebagai umpan balik terhadap diskursus antara “elit yang terinformasi” dan “masyarakat sipil yang responsif”.²⁷ Media yang bebas dan otonom serta partisipasi aktif warga masyarakat dalam ruang publik diperlukan dalam demokrasi deliberatif ini.

Media Sosial dan Potensinya Sebagai Ruang Publik

Manuel Castells dalam *The Rise of Network Society* berpendapat bahwa masyarakat kontemporer mengalami pergeseran ke arah masyarakat jejaring (*network society*) berbasis teknologi informasi.²⁸ Menurutnya, kebutuhan masyarakat untuk membentuk jejaring muncul khususnya setelah Perang Dunia berakhir. Masyarakat mulai bangkit untuk membangun kembali infrastruktur sosial, ekonomi, hingga pendidikan yang rusak karena perang. Dalam rangka memenuhi kembali kebutuhan produksi maupun distribusi, berbagai pabrik-pabrik saling membentuk relasi satu sama lain untuk bertukar informasi. Industrialisasi tumbuh kembali dengan ditandai semakin meningkatnya produksi, konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Internet menjadi sarana masyarakat yang saling terhubung dalam skala global untuk bertukar informasi.

Castells menyelidiki pergeseran bentuk komunikasi, yaitu dari bentuk komunikasi melalui media elektronik tradisional hingga media baru yang merupakan perpaduan teknologi internet, telekomunikasi seluler dan media massa. Televisi dan radio merupakan media elektronik dengan

karakter menyiarkan informasi searah dan tersentralisasi (dari satu stasiun televisi ke banyak orang). Menurut Castells, konvergensi (perpaduan) antara komputer, telekomunikasi seluler dan media massa menghasilkan bentuk komunikasi baru yaitu “komunikasi diri secara masif” (*mass-self communication*), dengan karakternya yang semakin interaktif, personal, fleksibel, terdesentralisasi, partisipatoris, kolaboratif, memungkinkan adanya “virtualitas yang nyata”, serta pengelolaan konten informasi secara mandiri, serta hadirnya komunitas-komunitas baru dalam dunia maya.²⁹

Web 2.0 (atau kerap dikenal dengan istilah aplikasi “media sosial”) merupakan suatu aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dikembangkan dari *Web 1.0*. Pada *Web 1.0*, para penggunanya hanya bertindak sebagai pencari atau penerima informasi dalam *www* yang bersifat statis saja (tidak berubah). Sementara itu, dalam *Web 2.0*, para penggunanya yang saling terhubung dapat berkomunikasi secara interaktif dengan mengelola konten informasi mereka sendiri (memproduksi, mengubah, mendistribusi atau hanya mengonsumsi informasi), sehingga ruang sosial virtual dapat dibentuk.³⁰ Jadi, pada *Web 2.0*, para pengguna bertindak tidak hanya sebagai penerima informasi (konsumen), melainkan dapat sekaligus menjadi produsen, penyiar, perantara, maupun penilai informasi. Kaplan dan Haenlein menyebut *Web 2.0* berkarakter “partisipatoris dan kolaboratif”.³¹ Sejalan dengan itu, Mark Pegrum menunjukkan bahwa *Web 2.0* memiliki kelebihan karena karakternya yang “relasional” (yang berbeda dengan *Web 1.0* yang berkarakter “informatif”).³² Lewat media sosial, komunikasi dapat berlangsung secara dialogis dan interaktif, tidak lagi searah.

Perkembangan teknologi internet membawa pemahaman baru tentang ruang publik. Zizi Papacharissi menunjukkan bahwa kemajuan teknologi internet memunculkan kemungkinan untuk memperluas gagasan tentang ruang publik, yaitu ruang publik virtual yang memungkinkan diskursus politik dilakukan dalam dunia maya di antara orang-orang yang saling terhubung secara global dengan kemudahan akses untuk memperoleh data.³³ Dengan itu, media sosial sebagai suatu aplikasi internet generasi kedua dengan karakternya yang partisipatoris, kolaboratif, atau relasional berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik politis yang sifatnya virtual. Selain dipakai untuk keperluan pertemanan atau komunikasi dalam

lingkup keluarga, media sosial dimanfaatkan sebagai sarana tindakan politis. Media sosial digunakan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu sebagai sarana untuk mengutarakan gagasan dan aspirasi kritisnya secara independen dan otonom melalui komunikasi dalam dunia maya.

Peluang media sosial untuk diterapkan sebagai ruang publik menjadi bahan kajian yang menarik. L. Diaz Romero menyatakan bahwa media sosial merupakan sarana ideal bagi kepentingan politis warga, sebab dapat dipakai sebagai ruang publik digital (*digital public sphere* atau *virtual agora*) yang memungkinkan deliberasi publik melalui diskusi rasional argumentatif dilakukan dalam cakupan seluas dunia (global), tanpa dibatasi batas-batas fisik negara.³⁴ Romero menunjukkan pentingnya media sosial sebagai sarana warga untuk berpartisipasi secara politik seperti melaksanakan pemilihan umum, berorganisasi atau membuat asosiasi, melakukan *voting* maupun kampanye, menggerakkan massa demonstrasi, melakukan boikot dan petisi, maupun aktivisme sosial lainnya dari lingkup lokal hingga global. Disamping itu, media sosial membantu meningkatkan kapasitas media konvensional karena digitalisasi yang ada membuat proses dialogis atau diskursif antarwarga menjadi semakin mudah, cepat, dan luas. Lewat media sosial, partisipasi politis warga dapat diwujudkan secara virtual melalui komunitas-komunitas sosial dalam dunia maya.

Peluang media sosial sebagai ruang publik juga disampaikan oleh Christian Fuch. Fuch memberi contoh penggunaan media sosial sebagai ruang publik, yaitu pada proyek kolaboratif Wikipedia. Wikipedia merupakan proyek ensiklopedi bersama, yang bersifat terbuka, dapat diubah atau disunting oleh siapa saja. Menurut Fuch, Wikipedia dilandasi oleh kerjasama untuk kepentingan bersama yang sifatnya nirlaba, sehingga tidak bisa dikontrol oleh kepentingan politik atau korporasi. Jadi, proyek kolaboratif seperti Wikipedia ini, bukan uang dan kekuasaan yang diutamakan, melainkan kultur kebebasan (*free culture*), keterbukaan akses, serta kolaborasi dalam berbagi informasi dan mengembangkan rasionalitas untuk saling mengkritisi maupun memperkaya pengetahuan satu sama lain.³⁵

Para peneliti semakin mengembangkan kemungkinan media sosial menjadi ruang publik. Menurut Lisa M. Kruse berserta dua rekannya penelitiannya, para peneliti yang mendukung gagasan media sosial

sebagai ruang publik melihat media sosial dibandingkan dengan media konvensional karena terutama menyediakan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi kepada para pengguna secara tidak terbatas. Selain itu, media sosial memiliki daya tarik bagi para penggunanya untuk dijadikan ruang publik karena dinilai memberi banyak pilihan berkomunikasi baik melalui kelompok atau individual, serta memungkinkan komunikasi dilakukan di antara peserta diskursus yang setara.³⁶

Tantangan yang Dihadapi Media Sosial Sebagai Ruang Publik

Di samping peluang yang ada tersebut, beberapa tantangan ditemukan pada media sosial untuk dapat diakomodasi sebagai ruang publik Habermas. Media sosial dipandang belum ideal untuk digunakan sebagai sarana diskursus rasional secara efektif. Gagasan ruang publik Habermas sulit untuk diterapkan pada konteks media sosial.

Salah satu kesulitan untuk menjadikan media sosial sebagai ruang publik adalah karena adanya kedangkalan komunikasi yang terjadi dalam media sosial. Pada media sosial, komunikasi secara mendalam dinilai sulit untuk dicapai. Reflektivitas bukan menjadi prioritas dalam komunikasi berbasis media sosial. Dalam percakapan lewat media sosial, pengguna tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk mempublikasikan informasi secara berjarak. Melalui media sosial, informasi dengan cepat dapat diterima maupun disebarkan ke banyak orang. Sebagaimana disampaikan Karlina Supelli, dengan segera kehadiran media sosial meningkatkan jumlah lalu lintas percakapan.³⁷ Arus percakapan di media sosial semakin meningkat seiring dengan komunitas-komunitas dunia maya yang juga bertambah. Segala pengalaman manusia sehari-hari diperbincangkan lewat media sosial, entah itu penting, berguna, benar, atau sama sekali tidak. Arus informasi yang mengalir berlimpah dengan cepat menghilangkan kesempatan bagi para pengguna media sosial untuk bisa berhenti sejenak, memilih dan memilah informasi dengan tepat, atau melakukan refleksi dan evaluasi terhadap informasi yang diterima. Sindhunata juga menilai dangkalnya komunikasi di media sosial yang melemahkan diskursus, sehingga baginya teori tindakan komunikatif Habermas relevan dipelajari dalam rangka mengimbangi pengaruh media sosial tersebut.³⁸

Kedangkalan itu membuat media sosial kurang dapat diandalkan dalam menyebarkan berita. Arus informasi yang berlimpah dan terus berganti secara cepat dalam media sosial menuntut para pengguna untuk segera menanggapi. Ketika tanggapan tidak diberikan, informasi itu dengan cepat menjadi basi atau tertutupi oleh begitu banyak informasi lainnya. Akibatnya, validasi terhadap kebenaran suatu informasi kerap luput dilakukan dalam komunikasi media sosial. Kecepatan arus informasi dalam media sosial menghilangkan peluang untuk berefleksi. Schmidt dan Cohen menyampaikan adanya fenomena krisis berita yang terjadi ketika media sosial dipakai untuk menyampaikan berita. Menurut mereka, media sosial dapat menjadi alat penyampai informasi unggul ketimbang media konvensional besar dari sisi kecepatan penyampaian berita, namun kehandalan, mutu, akurasi maupun kedalaman informasi hilang.³⁹

Media sosial memberi peluang bagi warga untuk memberitakan informasi secara personal kepada publik dalam bentuk *citizen journalism*, sehingga publikasi informasi dilakukan dengan mengikuti kehendak subjektif pengguna itu sendiri. Permasalahannya, pemberitaan independen oleh warga dalam media sosial tidak disertai dengan penerapan kaidah-kaidah etis jurnalistik konvensional, misalnya dalam hal objektivitas dan akurasi pemberitaan tentang suatu fakta. Sumber informasi yang diperoleh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Kualitas informasi menjadi diragukan. Kapasitas untuk mengklarifikasi akurasi sumber berita juga sangat terbatas. Selain itu, informasi tersebut senantiasa terbuka dan mudah untuk dimodifikasi. Artinya, validitas informasi menjadi diragukan. Kontrol dan seleksi yang dilakukan pengguna media sosial atas informasi lemah. Dalam publikasi konvensional, proses pemberitaan dilalui dalam beberapa tahap. Berita yang disampaikan seorang jurnalis, melewati proses seleksi dan pengecekan ketat sebelum dipublikasikan oleh editor maupun tim redaksi. Dalam jurnalisme independen versi media sosial, setiap orang dapat menjadi jurnalis, editor, maupun redaktur sekaligus. Masing-masing pengguna dengan latar belakang yang berbeda dan keterbatasan pengetahuan maupun kompetensi yang dimiliki dapat mempublikasikan informasi sendiri.

Disamping itu, dalam media sosial, sensasi lebih banyak ditampilkan ketimbang rasionalitas kritis. Hasrat lebih berperan dominan dalam membuat keputusan ketimbang nalar logis, yang ditandai dengan banyaknya

ketertarikan pengguna pada hal-hal yang sensasional, hiperbolik, dan pencitraan, namun tidak esensial maupun tidak memerlukan pemaknaan mendalam atas nilai-nilai. Para pengguna media sosial bisa begitu mudah terprovokasi, namun dengan segera dapat berbalik arah ketika berhadapan dengan bujukan atau ancaman kolektif tertentu. Situasi hilangnya rasionalitas kritis dalam bermedia sosial ini ibarat -meminjam istilah Bauman- “modernitas cair”, yang mewarnai situasi perubahan masyarakat ke arah postmodern dengan berbagai kompleksitas masalahnya.⁴⁰ Yang terjadi dalam media sosial adalah hasrat lebih banyak berperan menguasai komunikasi ketimbang rasionalitas.

Selain itu, dalam situasi kemajuan teknologi digital, fakta dan fiksi sulit dibedakan. Teknologi memungkinkan batas-batas perbedaan antara informasi yang merupakan fakta maupun fiksi dibuat menjadi kabur. Kekaburan perbedaan itu dimanfaatkan untuk kepentingan manipulatif. Fenomena yang tampak dalam komunikasi di media sosial adalah beredarnya berita-berita bohong maupun keliru. Banyaknya kebohongan dan ketidakjujuran dalam media itu didukung oleh kemudahan teknologi untuk memanipulasi.

Ralph Keyes menggambarkan situasi masyarakat yang ditandai dengan kebohongan dan ketidakjujuran melanda segala bidang kehidupan dan menjadi suatu kebiasaan dengan istilah pasca-kebenaran (*post-truth*).⁴¹ Baginya, situasi itu terjadi akibat dominasi emosi dan opini pribadi yang mengalahkan rasionalitas objektif. Keyes menyampaikan bahwa motif mendasar manusia untuk berbohong adalah pencitraan diri. Seseorang berbohong karena ia belum mampu mengelola dirinya secara matang, lalu berusaha mengatasi rasa tidak aman (*insecurity*) dengan mengejar “impresi yang baik dari orang lain”.⁴²

Media sosial lantas menjadi tempat untuk mengejar atau menyebarkan informasi yang sensasional dan menarik perhatian karena orang ingin berebut pengakuan dan kesan baik dari orang lain, serta mencari pengikut. Impresi dan kesan lebih banyak dipakai ketimbang logika. Pertukaran informasi di media sosial menjadi rentan terhadap manipulasi dan penyesatan. Berita bohong maupun palsu yang tersebar dapat menyebabkan suatu keputusan yang keliru yang merugikan orang lain. Tindakan menyebar *hoax* merusak situasi percakapan ideal dalam ruang publik virtual dan klaim-klaim validitasnya. Lebih lanjut, situasi *pasca-*

kebenaran dengan banyaknya peredaran *hoax* dan *fake news* di media sosial ini dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang pada dasarnya bersandar pada rasionalitas dan kebenaran.

Kedangkalan komunikasi dalam media sosial juga diikuti dengan kedangkalan relasi sosial yang dijalin di dalamnya. Suatu ikatan sosial baru dapat dengan cepat dibentuk (maupun diputus) melalui media sosial. Preferensi cepat berubah, sementara orang mudah berpindah keanggotaan komunitas tertentu dalam media sosial. Lewat interaksi secara virtual, relasi sosial tidak mendalam, melainkan hanya di permukaan. Identitas digital dalam media sosial dapat dengan mudah diubah atau disembunyikan. Romero menegaskan bahwa ikatan sosial di dalam media sosial cenderung rapuh, bersifat permukaan.⁴³

Selain itu, dalam praktiknya, media sosial sulit untuk dilepaskan dari intervensi kekuasaan politik maupun ekonomi. Pemerintah maupun sektor korporasi turut campur mengendalikan penggunaan media sosial sehingga media sosial tidak lagi independen dan otonom. Fuch melihat fenomena kontradiktif yang terjadi dalam media sosial, yaitu ketika di satu sisi media sosial hendak dimanfaatkan sebagai ruang publik, namun di sisi lain sulit untuk keluar dari perangkat kendali negara dan korporasi. Sebagai contoh, pemerintah maupun korporasi turut berperan dalam pengendalian data pengguna media sosial sehingga merusak potensi media sosial untuk menjadi ruang publik.⁴⁴

Campur tangan negara ini pada akhirnya tidak bisa dielakkan. Negara wajib bertindak ketika media sosial dinilai berbahaya. Contohnya, negara dapat mengintervensi media sosial yang disalahgunakan untuk melakukan aktivitas destruktif terhadap kemanusiaan (misalnya terorisme), memecah belah ikatan sosial, atau mengancam keutuhan demokrasi sendiri. Campur tangan pemerintah di dalam media sosial ini menjadi kontradiktif dengan makna awal ruang publik yang semestinya independen dan otonom. Bahkan, untuk keperluan keamanan, negara dapat memakai data pribadi pengguna, yang dengan itu berarti melanggar privasi mereka.

Fuchs juga menunjukkan bahwa korporasi-korporasi penyedia jasa media sosial melakukan komodifikasi atas data-data pengguna. Korporasi tersebut merampas privasi para pengguna untuk tujuan komersial, misalnya dengan menjual informasi nama, minat, lokasi, data diri teman, dan sebagainya. Komodifikasi data pengguna itu semakin dilengkapi

dengan praktik oligopoli maupun monopoli yang dilakukan perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial. Situasi ini membuat, kritik yang dilakukan para aktivis sosial menjadi tidak efektif. Di satu sisi, para aktivis sosial menyuarkan suara mereka lewat media sosial, sementara di sisi lain opini mereka dapat dikontrol oleh perusahaan penyedia layanan media sosial. Fuch menegaskan bahwa pada akhirnya struktur kapitalisme media sosial membatasi kebebasan warga masyarakat pengguna media sosial untuk berpendapat secara otonom.⁴⁵ Media sosial tidak bebas nilai dan sulit untuk dilepaskan dari pengaruh kekuasaan.

Situasi media sosial yang dikuasai korporasi sehingga membuat penggunaannya tidak bisa menghindari dari cengkeraman kekuatan kapitalisme digambarkan dengan jelas dalam film “The Social Dilemma” yang diproduksi tahun 2020 yang diproduksi bersama oleh Exposure Labs, Argent Pictures, Agent Pictures, dan The Space Program. Film itu menunjukkan adanya praktik komodifikasi data pengguna media sosial oleh perusahaan penyedia layanan media sosial. Data-data pengguna media sosial dikendalikan oleh korporasi-korporasi yang menyediakan layanan media sosial dengan bantuan teknologi dan algoritma. Korporasi-korporasi itu bertindak manipulatif, menyusup ke dalam ruang privat pengguna, serta memanfaatkan data pribadi mereka sedemikian rupa, sehingga menciptakan ketergantungan para pengguna agar memakai media sosial terus menerus.

Media sosial yang idealnya menjadi sarana deliberasi warga, dapat disalahgunakan untuk tujuan destruktif terhadap kemanusiaan. Para pengguna bebas untuk mengutarakan opini dan gagasan mereka lewat media sosial. Akan tetapi, kebebasan berkomunikasi dalam media sosial dapat disalahgunakan, sebagaimana dikatakan Hardiman.⁴⁶ Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong, menteror atau mengintimidasi, menyebar kebencian, menyebarkan konten berbahaya maupun pornografi, melakukan tindakan perundungan siber (*cyberbullying*), membangun fanatisme yang berlebihan dalam kelompok, dan sebagainya. Media sosial dapat dipakai untuk menghasut dan menyerukan ujaran kebencian, yang berdampak munculnya polarisasi masyarakat yang dapat berujung pada disintegrasi sosial. Di satu sisi, media sosial berguna untuk mewujudkan demokrasi, namun di sisi lain juga menjadi ancaman demokrasi karena rentan dimanipulasi untuk tujuan destruktif.

Dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia, ujaran-ujaran kebencian yang beredar di media sosial dalam konteks pemilihan umum 2024 menjadi contoh bagaimana media sosial lebih berperan sebagai sarana provokasi ketimbang ruang publik. Faktor emosional, sentimen pribadi, fanatisme berlebihan, maupun kepentingan politis tertentu yang dominan dapat mendistorsi atau bahkan menutup perdiskusian rasional yang netral dan konstruktif. Tindakan manipulatif untuk menyebar kebohongan yang membuat kesalahpahaman penafsiran dan membangkitkan permusuhan, merusak nilai media sosial sebagai sarana demokrasi. Arah dan tujuan percakapan pada akhirnya ditentukan oleh mereka yang memegang kendali atas kekuasaan.

Media sosial juga bisa disalahgunakan sebagai sarana perundungan siber.⁴⁷ Perundungan siber merusak privasi seseorang dan dapat membawa dampak kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan perundungan yang terjadi di dunia nyata. Data yang telah disebarkan dalam dunia maya sulit untuk dihapus atau diperbaiki, sehingga perundungan dapat terjadi berulang kali, terus menerus, dan sulit dihentikan.

Lisa M. Kruse dan dua rekannya, meneliti penggunaan media sosial di kalangan generasi milenial dan generasi X. Mereka menemukan bahwa media sosial cenderung dihindari sebagai ruang publik. Selain alasan ketakutan akan risiko yang dihadapi maupun preferensi politik yang sama, alasan media sosial tidak dipakai sebagai ruang diskursus politik adalah karena karakter media sosial itu sendiri yang pada dasarnya merupakan ruang percakapan yang menyenangkan.⁴⁸

Habermas menyatakan bahwa demokrasi deliberatif dapat dilaksanakan ketika media bebas dari pengaruh kepentingan negara dan politik, serta warga masyarakat berpartisipasi aktif dalam diskursus tentang persoalan-persoalan masyarakat yang muncul. Artinya, ketika media sosial berpihak pada kepentingan kekuasaan dan masyarakat tidak terlibat secara kritis dalam diskursus publik dalam media sosial, media sosial kehilangan potensinya sebagai ruang publik.

Implikasi praktis: Perlunya Literasi dalam Bermedia Sosial

Bertitik tolak dari berbagai tantangan yang ada tersebut, media sosial tampak belum memenuhi kriteria sebagai ruang publik sebagaimana diidealkan Habermas. Dalam praktiknya, negara maupun korporasi

mengintervensi arus informasi dalam media sosial, disamping pula kesadaran dan komitmen warga masyarakat untuk memanfaatkan media sosial untuk tujuan kritis dan emansipatoris masih terbatas.

Meskipun demikian, tidak berarti media sosial sama sekali tidak dapat digunakan sebagai ruang publik. Potensi media sosial untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik tetap terbuka. Tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada para aktor media sosial yang secara tulus berkomitmen menyuarakan aspirasi kritis mereka lewat media sosial tanpa pengaruh kepentingan kekuasaan maupun ekonomi. Media sosial digunakan individu maupun komunitas untuk melakukan gerakan sosial melawan praktik-praktik ketidakadilan sosial. Berbagai penyalahgunaan media sosial, seperti ujaran kebencian yang disebarkan lewat media sosial juga melahirkan “argumentasi rasional tandingan” sebagai reaksi kritis atasnya. Demikian pula, hoaks atau berita bohong yang disebarkan juga mengundang tanggapan rasional terhadapnya dengan cara mengklarifikasi berita-berita tersebut melalui situs resmi yang tersedia. Warga masyarakat semakin memiliki kesadaran dalam bermedia sosial. Media sosial dapat menjadi arena pembelajaran bersama oleh masyarakat untuk mewujudkan kebenaran, kebaikan dan keadilan dalam hidup bersama.

Meskipun belum mewujudkan ruang publik yang ideal, media sosial berpengaruh besar dalam kehidupan politis serta perubahan sosial. Media sosial dipakai sebagai alat untuk menggerakkan massa, seperti yang terjadi dalam kampanye politik dalam rangka pemilihan umum. Pengambilan keputusan politik turut dipengaruhi oleh opini, saran, komentar dalam media sosial. Amaro La Rosa menegaskan pengaruh penting dan efektif media dalam memobilisasi massa maupun meningkatkan aktivitas kolektif masyarakat sosial, karena penyebaran informasi lewat media sosial dapat dilakukan dengan cepat, serentak serta luas.⁴⁹ Pendapat La Rosa itu menggambarkan kekuatan besar media sosial sebagai alat perubahan sosial dibandingkan dengan media-media massa elektronik lainnya. Konsekuensi di balik kekuatan besar itu ialah dampak yang dihasilkan media sosial bisa lebih konstruktif, atau sebaliknya yaitu lebih destruktif bagi kehidupan bersama ketimbang media lainnya.

Karena pengaruh media sosial yang besar bagi perubahan sosial, pemberdayaan para pengguna media sosial lewat literasi bermedia sosial menjadi penting. Bagaimanapun, otoritas terakhir untuk menerima dan

menyampaikan informasi lewat media sosial terletak pada tangan para pengguna media sosial. Literasi bermedia sosial di sini bukan hanya soal kecakapan teknis atau kesantunan dalam bermedia sosial, melainkan terutama kecakapan etis. Kecakapan etis tersebut akan membentuk sikap dan tindakan para pengguna media sosial yang dilandasi prinsip solidaritas, kekritisn, maupun kehati-hatian (*caveat emptor*) dalam berkomunikasi melalui media sosial. Prinsip solidaritas, kekritisn, dan kehati-hatian tersebut dibangun dari tiga dasar, yaitu: kesadaran akan cara kerja kekuasaan dalam media sosial, kesadaran untuk menghargai dan melindungi martabat kemanusiaan, dan kesadaran akan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

Kesadaran akan cara kerja kekuasaan dalam bermedia sosial mengandung arti bahwa komunikasi melalui media sosial dihayati sebagai -meminjam istilah Foucault- pengalaman manusia menjalin relasi satu sama lain. Komunikasi dalam media sosial dibentuk dari jejaring kompleks yang menghubungkan banyak pihak, seperti pengguna media sosial, pemerintah, korporasi penyedia jasa media sosial, maupun pihak-pihak lain yang tidak terlibat secara langsung di dalam komunikasi tersebut. Setiap pihak saling terhubung, serta turut menentukan dan ditentukan oleh pihak lain. Keputusan seseorang untuk menyebarkan suatu informasi, misalnya, bisa saja berdampak tidak langsung pada pihak-pihak di luar dirinya di belahan dunia yang lain, sehingga menyebarkan informasi tidak boleh dilakukan serampangan tanpa pertimbangan kritis.

Kesadaran untuk menghargai dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bermedia sosial mengandung arti bahwa manusia harus menjadi tujuan, bukan instrumen dalam bermedia sosial. Manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Martabat kemanusiaan rapuh sehingga perlu dilindungi dan dihormati dalam setiap bentuk komunikasi melalui media sosial. Segala bentuk penggunaan media sosial yang bertentangan dengan martabat manusia harus ditolak.

Kesadaran untuk mencapai tujuan kebaikan bersama mengandung arti bahwa komunikasi melalui media sosial dilakukan bukan untuk kepentingan individual atau partikular, melainkan demi mewujudkan kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan bersama yang bersifat universal. Kepentingan umum tidak boleh dikorbankan untuk tujuan pribadi.

Simpulan

Pemikiran kritis Jürgen Habermas tentang tindakan rasional komunikatif, khususnya ruang publik, relevan untuk menyelidiki persoalan-persoalan mendasar seputar media dan demokrasi. Ruang publik politik dalam pandangan Habermas adalah ruang tempat warga masyarakat demokratis dapat menyalurkan aspirasi maupun opininya secara argumentatif, bebas dan tanpa tekanan atau paksaan apapun.

Media sosial atau *Web 2.0* merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan komunikasi antarmanusia dilakukan secara interaktif dengan pengelolaan konten informasi secara mandiri di tangan para pengguna. Media sosial, karena karakter partisipatorisnya, memiliki potensi untuk diterapkan sebagai ruang publik. Meskipun dalam praktiknya media sosial belum ideal untuk diterapkan sebagai ruang publik, media sosial berpengaruh besar bagi kelangsungan demokrasi dan perubahan sosial masyarakat.

Implikasi dari itu, para pengguna media sosial perlu memiliki dan mengembangkan literasi bermedia sosial dalam diri mereka, yang meliputi bukan hanya kecakapan teknis melainkan juga kecakapan etis bermedia sosial. Kecakapan etis membentuk sikap dan tindakan para pengguna media sosial yang dilandasi prinsip solidaritas, kekritisian, dan kehati-hatian, yang dibangun dari kesadaran akan relasi kuasa dalam media sosial, kesadaran akan penghormatan dan perlindungan atas martabat manusia, dan kesadaran akan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama.

Bibliography:

- Baert, Patrick. "Jürgen Habermas." *Profiles in Contemporary Social Theory*. Anthony Elliott & Bryan S. Turner (Eds.). London: Sage Publications Ltd., 2001.
- Castells, Manuel. *The Information Age, Economy, Society and Culture, Vol. I "The Rise of Network Society" 2nd Ed.* West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons Ltd. Publication, 2010.

- Cooke, Maeve. "Habermas's Social Theory: The Critical Power of Communicative Rationality". *Conception of Critique in Modern and Contemporary Philosophy*. Karin de Boer & Ruth Sonderegger (Eds.). Hampshire: Palgrave, 2012.
- Elliot, Anthony & Charles Lemert. *Introduction to Contemporary Social Theory*. London: Routledge, 2014.
- Fuchs, Christian. *Social Media: A Critical Introduction*. London: SAGE Publications Ltd., 2014.
- _____. "Social Media and the Public Space". *tripleC* 12, No. 1 (2014) 57-101.
- Habermas, Jürgen. "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research". *Communication Theory* 16 (2006): 411–426.
- _____. "The Public Sphere: An Encyclopedia Article. *Critical Theory and Society. A Reader*. Stephen E. Bronner & Douglas Kellner (Eds.). New York: Routledge, 1989: 136-142.
- _____. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: MIT Press, 1991.
- _____. *The Theory of Communicative Action Vol. 1*. Thomas McCarthy (Trans.). Boston: Beacon Press, 1984.
- _____. *The Theory of Communicative Action Vol. 2, Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason*. Thomas McCarthy (Trans.). Boston: Beacon Press, 1987.
- Hardiman, F. Budi. *Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).
- _____. *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009b.
- _____. "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas." *Ruang Publik: Melacak 'Partisipasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010: 185-202.
- _____. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009a.

- Sari, D.K. & Royke R. Siahainenia. "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah." *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 12, No. 1 (2015): 105-118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Kaplan, Andreas M; Haenlein, Michael,, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* (2010): 53.
- Kruse, Lisa M., Dawn R. Norris & Jonathan R. Flinchum. "Social Media as a Public Sphere? Politics on Social Media", *The Sociological Quarterly* (2017): 1-23. <https://doi.org/10.1080/00380253.2017.1383143>
- Magnis-Suseno, Franz. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Papacharissi, Zizi. "The Virtual Sphere: The Internet as A Public Sphere." *New Media & Society* 4, No. 1 (2002): 9-27.
- Patrut, Bogdan & Patrut, Monica (Eds.). *Social Media in Politics, Case Studies on the Political Power of Social Media*. London: Springer, 2014.
- Pegrum, Mark. *From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education*. Crawley: UWA Publishing, 2009.
- Reynolds, George W. *Ethics in Information Technology*. Boston: Course Technology, Cengage Learning, 2010.
- Schmidt, Eric & Jared Cohen. *The New Digital Age*. New York: Alfred A. Knopf, 2013.
- Sindhunata. "Teori Tindakan Komunikasi Habermas." *Basis* No. 07-08 (2020): 5-21.
- Supelli, Karlina. "Ruang Publik Dunia Maya". *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Kanisius, 2010: 329-346.

Endnotes:

- 1 Email: rudi.setiawan@unpar.ac.id.
- 2 Dewi Kartika Sari & Royke R. Siahainenia, "Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah", *Jurnal ILMU KOMUNIKASI* 12, No. 1 (2015) 113-118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>.
- 3 Lisa M. Kruse, et. al., "Social Media as a Public Sphere? Politics on Social Media", *The Sociological Quarterly* 59, Issue 1 (2018) 62-84.

- 4 F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009a.) 12-15.
- 5 F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009b) 27.
- 6 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Vol. 1*, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1984) 387.
- 7 *Ibid.*, 389-390.
- 8 Maeve Cooke, "Habermas's Social Theory: The Critical Power of Communicative Rationality", *Conception of Critique in Modern and Contemporary Philosophy*, ed. Karin de Boer & Ruth Sonderegger (Hampshire: Palgrave, 2012) 193.
- 9 Habermas, *op. cit.*, 1984, 285-286.
- 10 *Ibid.*, 295.
- 11 *Ibid.*, 117.
- 12 *Ibid.*, 25-26.
- 13 Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20* (Yogyakarta: Kanisius, 2000) 221. Bdk. Habermas, *op. cit.*, 1984, 23.
- 14 Patrick Baert, "Jürgen Habermas" *Profiles in Contemporary Social Theory*, ed. Anthony Elliott & Bryan S. Turner (London: Sage Publications Ltd, 2001) 88.
- 15 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Vol. 2, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*, trans. Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1987) 119-125.
- 16 *Ibid.*, 140-148.
- 17 *Ibid.*, 318-331.
- 18 Cooke, *op. cit.*, 196-197.
- 19 Hardiman, *op. cit.*, 2009b, 42-43.
- 20 Istilah ruang publik diterjemahkan dari kata Jerman *Öffentlichkeit* diartikan sebagai "keadaan yang dapat diakses oleh semua orang". Konsep ruang publik ini awalnya muncul di kalangan borjuis Eropa, lalu dikembangkan Habermas sebagai bentuk komunikasi antarwarganegara yang otonom dari pengaruh kekuasaan negara maupun pasar. Lihat Jürgen Habermas, "The Public Sphere: An Encyclopedia Article", *Critical theory and Society. A Reader*, ed. Stephen E. Bronner & Douglas Kellner (New York: Routledge, 1989) 136.
- 21 Lihat Hardiman, *op. cit.*, 2009b, 135.
- 22 Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (Cambridge: MIT Press, 1991) 142.
- 23 *Ibid.*, 181-195. Bdk Hardiman, "Komersialisasi Ruang Publik menurut Hannah Arendt dan Jürgen Habermas," *Ruang Publik: Melacak 'Partisipasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) 194-197.
- 24 *Ibid.*, 211.
- 25 Jürgen Habermas, "Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research", *Communication Theory* 16 (2006) 411.
- 26 Deliberasi berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang diterjemahkan secara sederhana sebagai "musyawarah". Sebagaimana dijelaskan Hardiman, gagasan demokrasi

deliberatif Habermas merupakan bentuk kedaulatan rakyat dengan menekankan aspek prosedur untuk menghasilkan dan mengontrol keputusan politis melalui diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politik publik. Di dalam negara hukum demokratis, posisi ruang publik menjadi penting sebab di dalamnya legitimasi hukum terjadi lewat prosedur pengujian diskursus publik. Apa yang disepakati oleh warganegara diterjemahkan ke dalam bentuk aturan yang harus dipatuhi dan bersifat mengikat kehidupan sosial mereka. Lihat Hardiman, *op. cit.*, 2009b, 126-128.

- 27 Habermas, *art.cit.*, 2006, 411-412.
- 28 Buku ini merupakan volume pertama trilogi bukunya *The Information Age, Economy, Society and Culture*. Lihat Manuel Castells, *The Information Age, Economy, Society and Culture, Vol. I "The Rise of Network Society" 2nd Ed.* (West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons Ltd. Publication, 2010) 5 - 18.
- 29 *Ibid.*, xxx.
- 30 Istilah "Web 2.0" diperkenalkan oleh Tim O'Reilly untuk menunjuk pada suatu bentuk aplikasi berbasis *www* yang memungkinkan para penggunanya mengelola konten sendiri untuk membuat, mengubah, atau membagikan informasi, yang meliputi aplikasi blog, microblog, situs jejaring sosial, dan sebagainya. Christian Fuch, *Social Media: A Critical Introduction*. (London: SAGE Publication Ltd., 2014) 32-35.
- 31 Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* 53 (2010) 62-64.
- 32 Mark Pegrum, *From Blogs to Bombs: The Future of Digital Technologies in Education* (Crawley: UWA Publishing, 2009) 18.
- 33 Zizi Papacharissi, "The Virtual Sphere: The Internet as A Public Sphere," *New Media & Society* 4, No. 1 (2002) 9.
- 34 Leocadia Diaz Romero, "On the Web and Contemporary Social Movements", Bogdan Patrut & Monica Patrut (eds.), *Social Media in Politics, Case Studies on the Political Power of Social Media* (London: Springer, 2014) 21-25.
- 35 Christian Fuchs, "Social Media and the Public Space", *tripleC* 12, No. 1 (2014): 92-93.
- 36 Kruse et. al., *art.cit.*, 62-84.
- 37 Karlina Supelli, "Ruang Publik Dunia Maya", *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis' dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Kanisius, 2010) 341-343.
- 38 Sindhunata, "Teori Tindakan Komunikasi Habermas", *Basis* No 07-08 (2020) 5.
- 39 Eric Schmidt & Jared Cohen, *The New Digital Age* (New York: Alfred A. Knopf, 2013) 47-49.
- 40 Bauman menggambarkan situasi masyarakat postmodern sebagai situasi yang serba tidak pasti, ambivalen, dan tidak terprediksi. Lihat Anthony Elliot & Charles Lemert, *Introduction to Contemporary Social Theory* (London: Routledge, 2014), 348-350.
- 41 Ralph Keyes, *The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (New York: St. Martin Press, 2004), 16.
- 42 *Ibid.*, 66-67.
- 43 Romero, *op. cit.*, 22-23.
- 44 Fuchs, *art. cit.*, 89.
- 45 *Ibid.*, 96.

- 46 F. Budi Hardiman, *Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital* (Yogyakarta: Kanisius, 2021) 62-63.
- 47 George W. Reynolds menunjukkan bentuk-bentuk perundungan siber ini meliputi pelecehan, perkataan menyakitkan, penghinaan, atau ancaman, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara daring. Lihat George W. Reynolds, *Ethics in Information Technology* (Boston: Course Technology, Cengage Learning, 2010) 310.
- 48 Kruse et. al., *op. cit.* 62-84.
- 49 Amaro La Rosa, "Social Media and Social Movements Around the World", Bogdan Patrut & Monica Patrut (eds.), *Social Media in Politics, Case Studies on the Political Power of Social Media* (London: Springer, 2014) 36-39.